

EVALUASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

Ayu Saskia¹, Muhammad Reza Fahlevy²

Abstrak

Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022, dibawah bimbingan Bapak Muhammad Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si. Penelitian ini bertujuan mengetahui Evaluasi pelaksanaan pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Barat beserta kendala yang menghambat juga pendorong yang mendukung implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui gambaran nyata atas kejadian yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi tentang implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Barat, juga melalui pengamatan yang dituliskan peneliti dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan adanya kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan seperti jaringan yang eror karena jaringan seluruh program SIAK di Indonesia berpusat pada KEMENDAGRI.

Kata Kunci : *evaluasi, sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)*

Pendahuluan

Informasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bisnis dan organisasi, karena informasi adalah komponen penting dari kehidupan bisnis dan organisasi, ia memainkan peran penting dalam operasi organisasi bersama sumber daya alam, keuangan, dan manusia. Selain itu, masyarakat didorong untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi secara maksimal karena kapasitas kita yang terbatas untuk mencerna data dan informasi yang begitu sering berubah. Sistem informasi dan teknologi sekarang menjadi komponen integral dari

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ayusaskia1010@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

kehidupan sehari-hari dan bekerja untuk orang-orang. Untuk merencanakan dan mengawasi tindakan organisasi, serta menyusun strategi untuk mencapai tujuan organisasi, informasi diperlukan. Untuk memastikan bahwa operasi operasional organisasi berhasil, diperlukan sistem pemantauan yang efisien.

Akibatnya, pengetahuan dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya dan meningkatkan produktivitas anggota. Karena banyaknya perubahan, ada beberapa terminologi yang terkait dengan informasi, dan tidak ada konsensus tentang frasa yang sering digunakan. Sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen berbasis komputer, teknologi informasi (TI), teknologi komputer, manajemen informasi, dan sistem informasi adalah beberapa kata yang sering digunakan. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang.

Penduduk Indonesia tidak merata karena merupakan negara kepulauan. Berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh ketimpangan distribusi penduduk seringkali berkembang dan memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan cepat dan membuat kebijakan. Selain itu, masalah kependudukan Indonesia juga merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat, persebaran yang tidak merata, dan kualitas hidup yang buruk. Berbagai masalah kependudukan, termasuk kemiskinan, kesehatan yang buruk, dan pengangguran, muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak merata yang tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), salah satu inovasi teknologi terbaru Ditjen Dukcapil, merupakan sistem digitalisasi yang dimanfaatkan dalam pelayanan Dukcapil yang dapat terkoneksi secara online secara nasional. Dari sisi sistem keamanan siber, sistem terpusat ini lebih efektif dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk), informasi administrasi kependudukan, dan catatan sipil (Disdukcapil) Kutai Barat dengan lebih cepat.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintahan saat ini dituntut untuk berinovasi dan beradaptasi dengan keadaan. Apalagi untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat, yang kita tahu secara langsung tidak mungkin terus melayani masyarakat secara langsung karena efek pandemi. PPKM, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang krisisnya sudah mencapai level 2, serta kebijakan pemerintah yang dimulai dengan penerapan WFH di setiap instansi pemerintahan beralih ke layanan daring membuat proses pemberian layanan publik di Disdukcapil menjadi tidak efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 15 Ayat (d) disebut bahwa : “ Gubernur melaporkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten kepada Menteri Melalui Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. Dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menyelesaikan permasalahan terkait administrasi kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sangat

membantu Disdukcapil dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di wilayah Kutai Barat maupun di luar wilayah Kutai Barat. Masalah administrasi data tradisional dapat dikurangi dengan manajemen data online. Pemasukan data dipermudah dan dipercepat dengan meminimalisir data identitas kependudukan yang bersifat rangkap dua, serta data yang lebih akurat dan akuntabel serta tidak dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan merupakan beberapa keuntungan yang dirasakan dari penerapan SIAK.

Disdukcapil Kutai Barat dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Namun karena tidak adanya pembangunan infrastruktur di wilayah Kutai Barat yang sedikit mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan, kemajuan teknologi saat ini tidak dapat berfungsi secara efisien. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dalam hal ini pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan tower (jaringan) dan pemantapan jaringan di instansi pemerintah, khususnya di Disdukcapil Kutai Barat agar sinkronisasi data tidak terhambat.

Selain itu, masih ada beberapa pihak yang masih belum jelas atau bahkan belum mengetahui fakta tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh rakyat secara lebih efektif dan efisien, maka harus berperan mendidik atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelayanan publik.

Kerangka Dasar Teori

Evaluasi

Arti evaluasi yang diberikan dalam Arikunto dan Jabar (2004)'s *Advanced Learner's Dictionary of Current English* adalah "untuk menemukan, memutuskan jumlah atau nilai, yaitu melakukan upaya untuk menentukan jumlah atau nilai". Istilah yang digunakan dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan penilaian harus dilakukan dengan baik, bertanggung jawab, menggunakan rencana, dan dapat dipertanggungjawabkan, disamping pengertian yang diturunkan dari terjemahannya. Selain itu, penilaian menurut Cross (1973) dalam Sukardi (2009:1) adalah prosedur yang menetapkan keadaan di mana suatu tujuan telah tercapai. Evaluasi menetapkan sejauh mana tujuan telah tercapai. Hubungan antara penilaian dan tujuan dari suatu kegiatan yang mengukur sejauh mana suatu tujuan dapat dicapai dijelaskan dengan baik oleh konsep ini. Pada kenyataannya, mengevaluasi informasi untuk pengambilan keputusan juga memerlukan pemahaman, menyediakan konteks, mengumpulkan, dan berbagi informasi tersebut. Senada dengan itu, Arikunto dan Jabar (2004:1) menegaskan bahwa penilaian adalah suatu proses pengumpulan data atas suatu karya yang kemudian digunakan untuk memilih tindakan yang terbaik.

E-government

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), “*E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya”. Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), “*E-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik”.

Kemudian menurut Depkemenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan E-Government adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id) Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pabilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa E-Government merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien. Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian E-Government diatas, yaitu:

- a. Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru;
- b. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 menetapkan rekomendasi kajian pembangunan dan administrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Administrasi Kependudukan Berskala Nasional: SIAK adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat instansi administrasi dan pelaksana sebagai satu kesatuan, pemenuhan hak-hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional dan aksesibilitas data informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara sehingga menjadi referensi bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 21 menyebutkan Sistem Informasi administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, Adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi

kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Dengan bantuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pembuatan dokumen kependudukan yang lebih terstruktur menjadi mungkin. Hal ini juga dimungkinkan dengan pengembangan SIAK yang sebelumnya mampu menata ulang secara digital dokumen-dokumen yang sebelumnya tersimpan di atas kertas. Hal ini meningkatkan efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam menjaga arsip arsip kependudukan. Karena data sudah tersistem, proses dan produk pelayanan kepala dinas sudah jelas, informasi sudah sesuai prosedur dan prosedur berkas kependudukan, kelengkapan data, serta sarana dan prasarana yang menunjang pekerjaan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, proses pelayanan dapat dilakukan tanpa kerumitan dengan kepastian sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penyelenggara.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lukman dalam Pasaolong (2011:134) yang menyatakan bahwa “Salah satu ukuran keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas (Prima) sangat bergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani, yaitu terhadap pelayanan eksternal dari seorang pelanggan. Perspektif lebih diutamakan atau diprioritaskan jika ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas.” Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengevaluasi pelayanan publik dengan fokus masyarakat sebagai penerima layanan (DISDUKCAPIL).

Penduduk

Manusia sejatinya tidak dapat hidup sendirian. Hal tersebut menyebabkan manusia harus hidup bersosialisasi dengan manusia yang lain untuk melangsungkan hidupnya. Adapun untuk bahasan terkait dengan sekelompok manusia yang hidup berdampingan dan melakukan kegiatan sosial dinamakan penduduk. Kelamin, kelahiran, kematian, kualitas, mobilitas dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi sosial, budaya, dan berpolitik yang memilikihak dan kewajiban.

Menurut Mantra (2009), Penduduk adalah individu dengan status sosialnya sebagai pribadi, anggota dalam keluarga, masyarakat, warga negara dan serangkaian himpunan kuantitas yang bertempat Penduduk adalah semua orang yang mendiami wilayah dan perwilayahan tertentu pada waktu tertentu dengan keterkaitan hubungan antara jumlah usia, status perkawinan, agama, jenis tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu. manusia dari menjadi anggota masyarakat. Budaya juga mencakup semua cara atau pola berpikir, merasa, dan bertindak. Orang-orang yang mempelajari budaya pasti tertarik dengan artefak budaya seperti rumah, pakaian, jembatan, model transportasi, dan lain sebagainya.

Perbedaan penduduk pendatang dan penduduk asli

Mengenai perbedaan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli,

Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak ada menyebutkan perbedaan antara keduanya, yang disebutkan hanya hak dan kewajiban penduduk, jadi dalam hal ini, baik WNI maupun orang asing memiliki persamaan hak dan kewajiban di bidang kependudukan. Adapun dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dinyatakan bahwa, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

1. Dokumen Kependudukan
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Perlindungan atas Data Pribadi
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
5. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis cermati, seharusnya jelas bahwa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, khususnya studi kasus sebagai fokus utama dan teknik untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang dikaitkan dengan beberapa orang atau kelompok orang. masalah sosial atau kemanusiaan.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian yang tujuan utamanya adalah mengembangkan penjelasan yang tidak memihak tentang keadaan tertentu.

Tugas penting termasuk dalam proses penelitian kualitatif ini, seperti mengembangkan pertanyaan dan prosedur, mendapatkan data tertentu dari partisipan, menyimpulkan tema umum dari topik tertentu, dan menilai signifikansi data. Struktur atau kerangka laporan akhir penelitian dapat diadaptasi. Partisipan dalam jenis penelitian ini diharuskan mengadopsi gaya perspektif penelitian induktif, berkonsentrasi pada makna individu

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi sumberdata/key informant maupun informant yang akan di mintai informasinya berkenaan dengan fokus penelitian yaitu Kepala Bidang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dan Operator SIAK Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu Oraganisasi Perangkat Daerah yang berfungsi untuk melayani masyarakat dalam pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga berfungsi untuk membentuk database kependudukan yang akurat

sehingga dapat digunakan sebagai data acuan bagi pemerintah daerah maupun instansi lainnya dalam mengambil kebijakan -kebijakan strategis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretariat dan beberapa bidang pekerjaan serta seksi – seksi di dalam bidang pekerjaannya.

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Administrasi Kependudukan (SIAK) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menyiapkan data dan informasi identitas penduduk berskala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga terjadi pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal yang tetap menjamin dan menjaga kerahasiaan dokumen.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Kutai Barat dalam perkembangannya sangat bermanfaat dan mendukung dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan dokumen yang semula membutuhkan waktu yang sangat lama, dengan adanya SIAK proses penerbitan dokumen kependudukan di Kabupaten Kutai Barat dapat diterbitkan dalam waktu yang lebih cepat.

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah mengaplikasikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerapkan E-Government dan memajukan tingkat pelayanan Administrasi Kependudukan masyarakat Kutai Barat.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebelum adanya SIAK data kependudukan kurang teratur karena masih ditemukan banyak data ganda yang digunakan oleh masyarakat, selain itu dalam penyimpanannya masih menggunakan sistem manual hingga kurang rapih dan saat dibutuhkan data tersebut masih sulit ditemukan. Dalam menunjang kegiatan penerapan SIAK ada beberapa faktor pendukung yang diperlukan guna semakin efektifnya program sebagai berikut :

1. Infrastruktur (Sarana dan prasarana)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dan vital untuk mempercepat proses pelayanan. Dengan terbangunnya infrastruktur yang memadai tentu akan semakin memudahkan bagi instansi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan.

2. Sumber Daya Manusia

Kemajuan teknologi informasi berkualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan utama dalam menghadapi perubahan.

3. Struktur dalam organisasi

Terkait badan pelaksana dari suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan, salah satu aspek dari struktur tersebut adalah adanya penetapan standar operasional prosedur atau pedoman operasional baku (POB).

4. Sikap dari para pelaksana kebijakan (*Disposisi*)

Ada 3 bentuk sikap atau respon pelaksana terhadap suatu kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut.

5. Pemegang kewenangan akses database,

Kewenangan untuk mengakses database kependudukan tidak dapat diberikan kepada setiap pegawai.

6. Evaluasi dan pengendalian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya di evaluasi dan dilakukan pengendalian, Indikatornya adalah kinerja para pegawai dalam melaksanakan setiap program yang dilaksanakan.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya
2. Pemahaman masyarakat yang merasa bahwa mengurus dokumen kependudukan memakan waktu yang cukup lama dan prosedurnya cukup berbelit-belit.
3. Jaringan yang terkadang menghambat ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelayanan
4. dengan sistem yang terintegrasi dengan pihak pusat.
5. Adanya jarak tempuh yang menjadi kendala masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan
6. Sebagian besar masyarakat masih kurang paham untuk melakukan pendaftaran secara online.

Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Barat 2022 berbasis teknologi berjalan dengan baik meskipun masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala.

2. Perkembangan Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Semakin berkembang. Perkembangan SIAK yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dari proses penerbitan dokumen yang semakin cepat, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik, pengolahan data penduduk lebih terstruktur dan lebih aman dengan cara memanfaatkan teknologi informasi sehingga kebocoran data informasi milik penduduk tidak terjadi. Sedangkan kendala yang ditemukan dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat antara lain :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya
 - b. Pemahaman masyarakat yang merasa bahwa mengurus dokumen kependudukan memakan waktu dan prosedurnya cukup berbelit-belit.
 - c. Jaringan Internet yang terkadang menghambat ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelayanan
 - d. Sistem yang terintegrasi dengan pihak pusat.
 - e. Jarak tempuh yang cukup jauh menjadi kendala masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan
 - f. Sebagian besar masyarakat masih kurang paham untuk melakukan pendaftaran secara online.

Saran

Melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih didapati berbagai kendala didalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022. Maka saran yang diajukan :

a. Support

- a) Perlu adanya sosialisasi untuk memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai dinas mengenai berbagai peraturan hukum terkait dengan penerapan SIAK
- b) Penambahan jumlah mesin printer dan percepatan pembangunan tower pemancar sinyal radio di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan perlu dilakukan dengan segera untuk mencegah keterlambatan pelayanan publik yang diberikan.
- c) Diadakannya sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait dengan perkembangan dan manfaat yang diberikan dari perkembangan program SIAK.

b. Capacity

- a) Harus dilakukannya rekrutmen petugas operator SIAK dengan latar belakang dan kompetensi yang memiliki kemampuan dan ketrampilan di bidang teknis teknologi informasi.

- b) Peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur SIAK secara bertahap tanpa membebani keuangan Negara dan Daerah.

c. *Value*

Pemerintah harus dengan segera mewujudkan data kependudukan yang terpusat berskala nasional untuk mewujudkan integrasi data dan tertib administrasi kependudukan. Sehingga apabila hal tersebut dapat terwujud, maka akan dapat diintegrasikan dengan bidang yang lain seperti perpajakan dan imigrasi.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S dan Jabar 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 2009. *Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.